

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGANAN BANJIR DI KOTA SAMARINDA

Yogi Syahrul Junaidi

NPP. 30.0980

Asal Pendaftaran Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Program Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: yogisyahruljunaidi.ysj@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Alma Arif, S.IP, M.A

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The author focuses on the problems of frequent flood disasters related to collaboration in flood management in Samarinda City. **Purpose:** The purpose of this study is to determine collaborative governance in flood management in Samarinda City. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with a deductive approach according to the theory of collaborative governance and collaboration dynamics. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. Data analysis used coding analysis techniques and data validity through triangulation and thick description. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are building awareness of the importance of flood management as an initial stage of collaboration, making memorandums of understanding between stakeholders, establishing collaboration with various parties and implementing flood contingency planning programs. **Conclusion:** From this research it can be concluded that collaborative governance in handling floods in Samarinda City has been running, this is due to collaboration between various parties in flood management.

Keywords: Disaster; Collaboration; Flood Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan bencana banjir yang sering terjadi terkait kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Samarinda. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Samarinda. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif menurut teori *collaborative governance* dan *collaboration dynamics*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis *coding* serta keabsahan data melalui triangulasi dan *thick description*. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pembangunan kesadaran akan pentingnya

penanganan banjir sebagai awal tahap kolaborasi, membuat nota kesepahaman antar *stakeholders*, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak serta melaksanakan program rencana kontingensi banjir. **Kesimpulan:** Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Samarinda telah berjalan, hal ini dikarenakan adanya kolaborasi antar berbagai pihak dalam penanganan bencana banjir.

Kata kunci: Bencana; Kolaborasi; Penanganan Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentuk baru tata kelola pemerintahan muncul untuk menggantikan cara pembuatan dan implementasi kebijakan yang bersifat manajerial. Tata kelola kolaboratif adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, yang memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam banyak hal, tata kelola kolaboratif membawa gagasan tentang pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabilitas. Hal ini membawa kita ke dunia tata kelola jaringan dan pemerintahan di mana kolaborasi menjadi budaya organisasi yang dominan dan pembuatan kebijakan dilakukan dengan konsensus serta kesepakatan (Bingham, 2011). Tata kelola kolaboratif berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang mengarah pada tujuan bersama dalam menghadapi permasalahan nasional, yang diantaranya ialah mengatasi masalah bencana alam.

Bencana alam berkaitan erat dengan kondisi geografis. Negara Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis, yang memiliki dua musim yaitu musim panas dan hujan dengan variasi cuaca, suhu, dan arah angin. Faktor iklim dan topografi permukaan yang bervariasi secara komparatif serta kondisi batuan yang kompleks secara fisik dan kimiawi, hal ini menyebabkan perkembangan tanah yang subur. Tanah yang subur memberikan pengaruh baik dan buruk secara beriringan. Keadaan ini menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan bagi manusia, termasuk berkembangnya bencana hidrometeorologi seperti banjir

Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir telah melanda selama setengah abad terakhir yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan properti, berdampak negatif pada kegiatan ekonomi, dan menyebabkan hilangnya nyawa dan penderitaan manusia secara luas (Barredo, 2009). Banjir menerjang di beberapa negara yang mengakibatkan banyak kerusakan serta kerugian. Berdasarkan data dari *The Emergency Event Database (EM-DAT)* dalam laporan yang dituliskan dengan judul “2021 disaster in number” menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh negara pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 223 dari total 432 bencana alam (CRED, 2021). Dalam laporan ini juga disebutkan bahwa banjir telah mengakibatkan 4.143 korban jiwa meninggal dunia. Banjir disebut sebagai bencana yang paling mematikan dari semua bencana alam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di tahun ini terdapat 3.027 bencana alam yang terjadi pada rentan waktu 1 Januari hingga 29 Oktober 2022. Banjir merupakan bencana alam terbanyak,

yaitu sebanyak 1.238 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa banjir menjadi tantangan besar dalam penanganan bencana alam bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya di Kota Samarinda. Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh BNPB, menunjukkan bahwa Kota Samarinda masuk dalam kategori Kelas Risiko Tinggi Banjir (IRBI, 2021). Sebanyak 8 dari 10 kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori risiko tinggi banjir, artinya banjir menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh Kota Samarinda.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanganan banjir di Kota Samarinda. Permasalahan banjir di Kota Samarinda secara umum diakibatkan oleh limpasan permukaan yang berlebihan dan tidak terserap oleh badan sungai sehingga menyebabkan air meluap (Sulaiman et al., 2020). Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan upaya untuk mengurangi banjir di Kota Samarinda, namun permasalahan tersebut belum juga teratasi dikarenakan masih terdapat genangan air di berbagai ruas jalan di Kota Samarinda pada saat musim hujan (Pratiwi & Ndraha, 2018). Banjir tersebar merata hampir merata diseluruh kecamatan. Peningkatan kasus banjir merupakan tanda belum adanya penanganan yang membaik dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap strategi penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda (Sodik, 2015). Kebutuhan lahan usaha maupun ketersediaan lahan untuk infrastruktur berpengaruh pada penggunaan lahan sehingga dapat membatasi jumlah air yang dapat meresap ke dalam tanah. Selain itu, lahan terbuka yang semakin banyak menyebabkan sedimentasi di sungai yang mengurangi daya tampung air sungai dan menyebabkan banjir di Kota Samarinda. Semakin muda usia lapisan tanah, maka semakin mudah tererosi oleh air hujan (Sulaiman et al., 2020).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks *Collaborative Governance* maupun konteks penanganan banjir. Penelitian Nahot Tua Parlindungan Sihalohe berjudul *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan* menemukan bahwa komponen pengendalian banjir di Kota Medan memerlukan perhatian lebih, dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan tata kelola *distributive* (Sihalohe, 2022). Penelitian Bima Ade dan Eka yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara* menemukan kondisi yang menyebabkan banjir ialah terjadinya penimbunan sampah di ulu sungai (Bima Ade Prayoga Setiawan et al., 2021). Penelitian Tin dan Lim yang berjudul *Evolution of Collaborative Governance in the 2015, 2016, and 2018 Myanmar Flood Disaster Responses: A Longitudinal Approach to a Network Analysis* menemukan bahwa jaringan kolaboratif proses pencarian dan penyelamatan ditanggap bencana berevolusi dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pola hipotesis formasi ikatan kuat, lemah, dan preferensial (Aung & Lim, 2021). Penelitian Gerard yang berjudul *Collaborative governance and rare floods in urban regions – Dealing with uncertainty and surprise* menjelaskan bahwa implikasi dalam contest kolaborasi, partisipasi dan pemerintahan (Hutter, 2016). Penelitian Edward dkk berjudul *Participatory and collaborative governance for sustainable flood risk management: An emerging research agenda* menemukan bahwa

manajemen risiko banjir berbeda dengan bidang tata kelola lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan lebih banyak pengaruh langsung dari pemangku kepentingan dan kebutuhan akan solusi yang dinegosiasikan secara lokal (Challies et al., 2016). Penelitian Maria berjudul *Collaborative governance and environmental authority for adaptive flood risk: recreating sustainable coastal cities Theme 3: pathways towards urban modes that support regenerative sustainability* menemukan bahwa negara (publik) atau otoritas non-negara (baik swasta atau rakyat) dapat menerapkan dan mempertahankan program adaptasi iklim yang efektif termasuk dalam mengelola risiko banjir (Francesch-Huidobro, 2015).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Banjir di Kota Samarinda dengan menggunakan teori Collaborative Governance yang dicanangkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2008) dan Collaboration Dynamics yang dicanangkan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi dan Stephen Balogh (2012). Pada penelitian sebelumnya, baik yang dilakukan oleh Nahot (2022), Bima Ade dan Eka (2021), Tin dan Lim (2021), Gerard Hutter (2016), Edward Challies dkk (2016) dan Maria (2015) tidak ada yang menggunakan gabungan dari kedua teori tersebut didalam penelitiannya. Kemudian lokasi penelitian yang juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kota Samarinda

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Samarinda.

II. METODE

Penelitian skripsi yang dilaksanakan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengaktualisasikan kegiatan lapangan yaitu mengamati, melihat, menganalisa atau mengkaji permasalahan yang sedang terjadi, dengan demikian peneliti dapat terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari pada lokasi penelitian. Penulisan ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan induktif, karena metode yang digunakan yaitu dengan cara berfikir dan berlandaskan hal yang umum ke khusus. Pendekatan induktif dapat memberikan solusi terhadap masalah yang telah terjadi dengan menemukan fakta. Dari fakta tersebut, kemudian dapat disimpulkan suatu kesimpulan umum dari sebuah keadaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan bahan penelitian berbentuk pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada informan penelitian yang beragam. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti bisa menentukan permasalahan yang lebih terbuka dan luas. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang terdiri dari Walikota Samarinda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan BPBD, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Dinas PUPR, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial dan Masyarakat. Kemudian melalui observasi peneliti dapat mengetahui keadaan secara faktual dan aktual kondisi di lapangan dengan mengamati fenomena dan gejala sosial tentang penanganan banjir yang terjadi di Kota Samarinda. Peneliti melaksanakan pengamatan terhadap setiap proses yang kemudian disandingkan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian melalui dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari informan berupa dokumen, laporan-laporan tertulis ataupun peraturan yang berhubungan terhadap penanganan banjir di Kota Samarinda. Peneliti juga melakukan metode dokumentasi berupa foto, video ataupun rekaman suara tentang penanganan banjir di Kota Samarinda.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui analisis coding. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu Coding. Coding adalah proses menelaah dan menguji data mentah yang ada dengan melakukan pemberian label dalam bentuk kata-kata, frase atau kalimat (Saldana, 2009). Beberapa kategori mungkin berisi kumpulan data berkode yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut menjadi sub kategori. Kategori utama dibandingkan satu sama lain dan dikonsolidasikan. Sebagai dasar, kodefikasi biasanya mengikuti skema yang ideal dan ramping. Untuk membuat penilaian berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan, peneliti menggunakan teknik pengkodean dan analisis data kualitatif. Metode ini memfasilitasi analisis dan meningkatkan ketepatan interpretasi. Coding adalah metode mengkategorikan dan menyusun data kualitatif untuk menemukan banyak tema dan hubungan di antara mereka. Penelitian ini menggunakan metode coding deduktif. Pengkodean deduktif adalah metode pengkodean di mana peneliti mengembangkan teori sebagai referensi untuk memandu peneliti melalui proses pengkodean. Metode coding deduktif dipilih karena peneliti menentukan pengkodean berdasarkan teori yang digunakan baik dalam judul, pertanyaan penelitian, definisi dan kajian Pustaka sehingga dalam pengumpulan data lebih terarah sesuai pengkodean.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Banjir di Kota Samarinda

Pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* yaitu teori yang dicanangkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2008) yang menjelaskan tata kelola kolaboratif dengan beberapa dimensi yang meliputi

1. Starting Condition
2. Institutional Design
3. Facilitative Leadership
4. Collaborative Process

a. Starting Condition (Kondisi Awal)

Terkait dimensi kondisi awal, collaborative governance ditunjukkan dengan adanya kolaborasi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang melibatkan 20 instansi dan adanya kolaborasi dalam penanganan berbagai konflik dan kepentingan terhadap penanganan banjir.

b. Institusional Design (Desain Institusional)

Terkait dimensi desain institusional, collaborative governance ditunjukkan dengan adanya kolaborasi pemerintah dalam partisipasi forum yang dibuat dan terbentuknya forum terbatas yaitu forum pengurangan risiko bencana. Hal lain juga ditunjukkan dengan adanya aturan yang mewadahi penanganan banjir di Kota Samarinda.

c. Fasilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Terkait dimensi kepemimpinan fasilitatif, collaborative governance ditunjukkan dengan adanya pemahaman dan kompetensi yang dimiliki pimpinan dalam penanganan banjir di Kota Samarinda

d. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Terkait dimensi proses kolaborasi, collaborative governance ditunjukkan dengan adanya kolaborasi pemerintah dengan dialog tatap muka yang dilakukan oleh seluruh pihak. Hal lain juga ditunjukkan dengan kepercayaan yang dibangun antar pemangku kepentingan serta komitmen yang dibangun dalam penanganan banjir di Kota Samarinda yang tertuang dalam rencana kontigensi banjir Kota Samarinda.

3.2. Dinamika Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Banjir di Kota Samarinda

Pada penelitian yang dilakukan peneliti, menggunakan teori *Collaboration Dynamics* yaitu teori yang dicanangkan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi dan Stephen Balogh (2012) yang menjelaskan dinamika tata kelola kolaboratif dengan beberapa dimensi yang meliputi

1. Principled Engagement
2. Shared Motivation
3. Capacity for Joint Action

a. Principled Engagement (Keterlibatan Berprinsip)

Terkait dimensi keterlibatan berprinsip, collaborative dynamics ditunjukkan dengan adanya pemahaman kolaborasi baik dari segi penemuan, definisi, pertimbangan dan penentuan dalam penanganan banjir di Kota Samarinda

b. Share Motivation (Berbagi Motivasi)

Terkait dimensi berbagi motivasi, collaborative dynamics ditunjukkan dengan adanya komitmen, kepercayaan dan legitimasi inernal dalam penanganan banjir di Kota Samarinda

c. Capacity for Joint Action (Kapasitas untuk Aksi Bersama)

Terkait dimensi kapasitas untuk aksi bersama, collaborative dynamics ditunjukkan dengan adanya tata cara dan kelembagaan, pengetahuan, sumber daya dan kepemimpinan dalam penanganan banjir di Kota Samarinda

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tata kelola kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Samarinda akan berdampak pada pelaksanaan penanganan banjir itu sendiri. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nahot (2022) yang menunjukkan bahwa komponen pengendalian banjir memerlukan perhatian lebih, dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan tata kelola *distributive*, sedangkan dalam penelitian ini menemukan bahwa penanganan banjir perlu didasari regulasi, sumber daya, komitmen, kepemimpinan dan strategi yang diterapkan. Pada penelitian ini juga ditemukan penyebab terjadinya banjir yaitu berkaitan dengan faktor alam dan non alam serta pemahaman. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan berdampak pada terjadinya penimbunan sampah yang terjadi di sungai, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kondisi daerah aliran sungai Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Bima dan Eka (Bima Ade Prayoga Setiawan et al., 2021) yang menyatakan bahwa penyebab banjir ialah terjadinya penimbunan sampah di sungai. Pada penelitian Tim dan Lim (2021) mengungkapkan bahwa jaringan kolaboratif proses pencarian dan penyelamatan ditanggap bencana berevolusi dari waktu ke waktu, Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada penelitian diwaktu tertentu. Pada penelitian Gerard (2016) menyoroti dua strategi pilihan untuk memfokuskan kolaborasi, berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya berfokus pada strategi melainkan pada penanganan yang lebih umum. Penelitian Edward dkk (2016) menganalisis dari beberapa jurnal yang kemudian menyimpulkan bahwa manajemen risiko banjir berbeda dengan bidang tata kelola lingkungan, berbeda dengan penelitian ini yang tidak menganalisis risiko manajemen risiko bencana. Penelitian Maria (2015) mengungkapkan bahwa negara (publik) atau otoritas non-negara (baik swasta atau rakyat) dapat menerapkan dan mempertahankan program adaptasi iklim yang efektif termasuk dalam mengelola risiko banjir, sama halnya dengan penelitian ini bahwa kolaborasi dari berbagai pihak dapat melakukan penanganan banjir.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Samarinda telah berjalan sesuai dengan analisis terhadap teori *Collaborative Governance* dan *Collaboration Dynamics*. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pembangunan kesadaran akan pentingnya penanganan banjir sebagai awal tahap kolaborasi, membuat nota kesepahaman antar *stakeholders*, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak serta melaksanakan program rencana kontigensi banjir. Usulan penulis terhadap beberapa kekurangan yang ditemukan ialah agar adanya stimulan berupa pemberian insentif, keterbukaan informasi kebencanaan secara sistematis dan adanya pengertian antar pihak yang terlibat dilapangan sesuai dengan tupoksinya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Samarinda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aung, T. M., & Lim, S. (2021). Evolution of Collaborative Governance in the 2015, 2016, and 2018 Myanmar Flood Disaster Responses: A Longitudinal Approach to a Network Analysis. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(2), 267–280. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00332-y>
- Barredo, J. I. (2009). Normalised flood losses in Europe: 1970–2006. *Natural Hazards and Earth System Science*, 9(1), 97–104. <https://doi.org/10.5194/nhess-9-97-2009>
- Bima Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Bingham, L. B. (2011). Collaborative governance. In *The SAGE Handbook of Governance*. <https://doi.org/10.4135/9781446200964.n25>
- Challies, E., Newig, J., Thaler, T., Kochskämper, E., & Levin-Keitel, M. (2016). Participatory and collaborative governance for sustainable flood risk management: An emerging research agenda. *Environmental Science and Policy*, 55, 275–280. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.09.012>
- CRED. (2021). Extreme events defining our lives Executive summary. *Centre for Research on the Epidemiology of Disasters*. <https://doi.org/10.1787/eee82e6e-en>
- Francesch-Huidobro, M. (2015). Collaborative governance and environmental authority for adaptive flood risk: Recreating sustainable coastal cities: Theme 3: Pathways towards urban modes that support regenerative sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 107, 568–580. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.045>
- Hutter, G. (2016). Collaborative governance and rare floods in urban regions - Dealing with uncertainty and surprise. *Environmental Science and Policy*, 55, 302–308.

<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.028>

IRBI. (2021). 2021. 1(6), 8–11.

Pratiwi, & Ndraha, A. B. (2018). Strategi Pengendalian Banjir Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 5, 141–156.

Saldana, J. (2009). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*.

Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramiora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>

Sodik, F. (2015). *Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Samarinda*. 3(2), 782–796.

Sulaiman, M. E., Setiawan, H., Jalil, M., Purwadi, F., S, C. A., Brata, A. W., & Jufda, A. S. (2020). Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Geografi Gea*, 20(1), 39–43.

<https://doi.org/10.17509/gea.v20i1.22021>

